

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kawasan Asia Timur merupakan salah satu kawasan dengan dinamika keamanan paling dalam dalam sistem internasional kontemporer. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakter sistem internasional yang bersifat anarkis, di mana tidak terdapat otoritas supranasional yang mampu menjamin keamanan negara secara menyeluruh. Dalam situasi tersebut, negara-negara di Asia Timur berinteraksi melalui pola interdependensi yang tinggi, sekaligus terlibat dalam perebutan pengaruh strategis yang melibatkan kekuatan besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Interaksi ini menjadikan isu keamanan di kawasan bersifat saling terkait dan rentan terhadap eskalasi ketegangan.

Dinamika keamanan di Kawasan Asia Timur mulai mengemuka sejak Perang Semenanjung Korea pada tahun 1950-1953, yang menjadi salah satu konflik bersenjata utama di kawasan pasca Perang Dunia II sekaligus menandai konfrontasi militer pertama pada era Perang Dingin. Semenanjung Korea awalnya dikuasai oleh Jepang pada tahun 1905, sebelum akhirnya jatuh ke tangan Blok Sekutu yang berhasil memenangkan Perang Dunia II pada tahun 1945. Perbedaan kepentingan ideologi dan kekuatan berujung pada terpecahnya Semenanjung Korea menjadi dua bagian, yaitu Korea Selatan (*Republic of Korea*) yang merdeka pada 15 Agustus 1948 dan Korea Utara (*Democratic People's Republic of Korea*) yang menyatakan kemerdekaannya pada 9 September 1948. Keterlibatan negara-negara besar, seperti

Amerika Serikat yang menjadi sekutu Korea Selatan dan Uni Soviet yang memberikan dukungannya kepada Korea Utara, mendorong hubungan kedua negara menjadi perang proxy. Konflik semakin memanas ketika Korea Utara melakukan serangan militer tak terduga terhadap Korea Selatan pada tahun 1950, meskipun akhirnya berhasil dibalas ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dan mengirimkan 16 negara untuk membantu Korea Selatan. Butuh waktu tiga tahun sebelum Perang Semenanjung Korea berakhir dengan penandatanganan perjanjian gencatan senjata pada tahun 1953. Namun, bahkan setelah itu, hubungan kedua Korea tetap tegang dan cenderung mencurigai satu sama lain.

Situasi hubungan yang tidak pasti menjadikan program senjata nuklir dan rudal yang aktif milik Korea Utara sebagai sesuatu yang dikhawatirkan pemerintah di seluruh dunia, khususnya Korea Selatan dan negara-negara di Kawasan Asia Timur. Korea Utara yang memulai program pengembangan nuklirnya pada tahun 1950-an, bekerja sama dengan Uni Soviet untuk membangun fasilitas teknologi nuklir. Meski sempat menandatangani *Non-Proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 1985, Korea Utara keluar dari perjanjian tersebut pada 2003, memulai kembali program nuklirnya dan mengusir pengawas *International Atomic Energy Agency* (IAEA) (Roza 2016, 6). Uji coba nuklir pertamanya pada Oktober 2006, diikuti dengan uji coba berikutnya pada Mei 2009, Februari 2013, dan Januari 2016 (Kusuma and Putri 2021, 2-3). Rangkaian uji coba tersebut merupakan bukti nyata perkembangan kemampuan nuklir Korea Utara, juga menunjukkan bahwa program tersebut sebagai ancaman serius bagi stabilitas kawasan, terutama dengan

penguasaan Rudal Balistik Antarbenua atau *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM) yang memiliki jangkauan sangat luas, bahkan hingga wilayah Amerika Serikat.

Korea Selatan sebagai negara tetangga yang paling dekat, merespons pengembangan nuklir Korea Utara melalui berbagai langkah strategis untuk menjaga keamanan nasionalnya. Langkah-langkah tersebut semakin terlihat jelas pada masa pemerintahan Presiden Park Geun Hye (2013-2017), yang menerapkan kebijakan konservatif dan tegas dalam merespons ancaman nuklir Korea Utara. Park Geun Hye memandang kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara sebagai ancaman serius terhadap stabilitas kawasan dan kepentingan keamanan nasional Korea Selatan (Ahn and Im 2013). Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menyetujui kerja sama dengan Amerika Serikat terkait pemasangan sistem *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD).

*Terminal High Altitude Area Defense* adalah sistem pertahanan udara buatan Amerika Serikat yang dirancang untuk menghadapi serangan rudal balistik jarak pendek dan menengah (Lockheed Martin n.d.). Kesepakatan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat Korea Selatan karena dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga keamanan dari ancaman militer Korea Utara. Namun, kekhawatiran muncul terkait risiko Korea Selatan menjadi sasaran serangan dari negara lain, seperti Tiongkok, yang secara tegas menolak keberadaan THAAD di kawasan tersebut. Tiongkok memandang THAAD sebagai ancaman terhadap keamanan negaranya dan bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menahan pengaruh Tiongkok di Asia Timur, juga menganggap bahwa THAAD berpotensi

digunakan untuk mengawasi aktivitas militernya, sehingga memicu ketegangan bilateral dan meningkatkan kewaspadaan negara-negara lain terhadap Amerika Serikat dan aliansinya.

Keseimbangan kekuatan di Asia Timur sendiri tidak terbentuk dari satu faktor tunggal, melainkan dari kombinasi struktural antara anarki sistem internasional, interdependensi, perebutan pengaruh, dan respons negara terhadap dilema keamanan. Amerika Serikat berusaha mempertahankan dominasi keamanannya melalui aliansi strategis, sementara Tiongkok berfokus pada penguatan ekonomi dan militer untuk membangun pengaruhnya. Di tengah ketegangan ini, negara-negara seperti Korea Selatan tentu berupaya memanfaatkan hubungan dengan kedua kekuatan besar ini untuk mendapat keuntungan ekonomi dari Tiongkok dan keamanan dari Amerika Serikat. Namun, letak pemasangan THAAD di pangkalan Angkatan Udara Korea Selatan di Seongju, dekat perbatasannya dengan Tiongkok, justru menyulut risiko eskalasi kompleksitas dan ketegangan yang menjadikan Kawasan Asia Timur sebagai wilayah yang rentan terhadap konflik.

Penolakan keras Tiongkok dapat dilihat dari pemberlakuan sanksi ekonomi terhadap Korea Selatan sebagai respons atas pemasangan THAAD, yang meliputi pengurangan jumlah wisatawan, pembatasan impor produk, hingga larangan terhadap hiburan dan budaya dari Korea Selatan (Zhao 2017). Sanksi-sanksi ini berdampak signifikan terhadap beberapa perusahaan Korea Selatan yang bergantung pada pasar Tiongkok, menyebabkan penurunan produksi bahkan penutupan bisnis. Ketegangan akibat THAAD sedikit mereda pada 30 Oktober

2017 ketika Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung Wha menyetujui *Three NOs Policy* dalam sidang parlemen di Majelis Nasional (C. Park 2017). Pada akhir Oktober 2017, Tiongkok dan Korea Selatan sepakat menormalisasi hubungan diplomatik yang sempat memburuk akibat pemasangan THAAD (Sung 2017). Pertemuan antara Presiden Moon Jae In dan Presiden Xi Jinping pada KTT APEC di Da Nang, Vietnam, 11 November 2017, menandai awal dimulainya kembali kerja sama antara kedua negara tersebut (Han 2017). Namun, keadaan kembali memanas setelah Yoon Seok Yeol terpilih sebagai presiden Korea Selatan pada Mei 2022.

Saat masa kampanye pemilihan presiden Korea Selatan 2022, Yoon Seok Yeol mengungkapkan niatnya untuk membeli baterai tambahan THAAD dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara terhadap ancaman Korea Utara (Hong 2022). Tiongkok memberikan respons melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian pada konferensi pers tanggal 27 Juli 2017 dengan meminta Korea Selatan untuk tetap berkomitmen pada *Three NOs Policy* (An 2022). Hal tersebut kemudian dibantah pada 10 Agustus 2022 oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Park Jin yang menegaskan bahwa *Three NOs Policy* bukanlah komitmen resmi Korea Selatan terhadap Tiongkok, melainkan kebijakan dari pemerintahan presiden sebelumnya, yaitu Moon Jae In (Yonhap News Agency 2022). Mengingat reaksi Tiongkok terhadap keputusan Korea Selatan terkait penerapan THAAD sebelumnya, tidak menutup kemungkinan bahwa langkah yang diambil oleh Presiden Yoon Seok Yeol dapat memicu ketegangan baru dalam hubungan antara kedua negara tersebut. Pemasangan

kembali sistem THAAD di Korea Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Yoon Seok Yeol memiliki dampak signifikan terhadap dilema keamanan di Kawasan Asia Timur. Penerapan Kembali THAAD ini tidak hanya memengaruhi hubungan bilateral antara Korea Selatan, Tiongkok dan Amerika Serikat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan intervensi militer asing yang dapat mengganggu keseimbangan kekuatan di Kawasan Asia Timur.

Berdasarkan konsep *security dilemma*, upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanan nasionalnya dalam sistem internasional yang anarkis kerap menghasilkan dampak sebaliknya, karena tindakan yang bersifat defensif dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain. Salah satu aspek utama yang muncul dalam konteks ini adalah interdependensi keamanan antara negara-negara di Asia Timur. Pemasangan THAAD yang ditujukan untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman Korea Utara pada kenyataannya turut menimbulkan kekhawatiran Tiongkok, yang memandang bahwa sistem tersebut berpotensi digunakan untuk memantau aktivitas militer. Reaksi keras dari Tiongkok, termasuk penerapan sanksi ekonomi, menunjukkan bagaimana suatu kebijakan pertahanan yang dianggap defensif oleh satu negara dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain dan memicu ketegangan keamanan yang lebih luas.

Keputusan Korea Selatan untuk menerapkan kembali sistem THAAD berpotensi memperdalam polarisasi serta memperkuat konfigurasi aliansi keamanan di Kawasan Asia Timur. Dalam kerangka *security dilemma*, langkah yang dipersepsikan Korea Selatan sebagai upaya defensif untuk merespons ancaman Korea Utara justru ditafsirkan secara berbeda oleh aktor lain, khususnya

Tiongkok. Bagi Korea Selatan, keberadaan THAAD merupakan kebutuhan strategis yang bersifat mendesak dan eksistensial, sedangkan bagi Tiongkok, sistem tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap keseimbangan militer dan stabilitas strategis kawasan.

Perbedaan persepsi ini memicu peningkatan ketegangan kawasan karena mendorong negara-negara di Kawasan Asia Timur untuk memperkuat kemampuan militer dan mempererat aliansi keamanan masing-masing. Dinamika tersebut menciptakan lingkaran eskalasi yang khas dalam *security dilemma*, di mana upaya peningkatan keamanan satu negara justru menimbulkan rasa tidak aman bagi negara lain, sehingga berpotensi memicu perlombaan senjata maupun konflik terbuka. Selain itu, keberadaan THAAD yang dianggap memperluas kapabilitas strategis Amerika Serikat di kawasan turut memperuncing rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas keamanan Kawasan Asia Timur secara keseluruhan. Maka dari itu, penerapan kembali THAAD oleh Korea Selatan tidak semata-mata berkaitan dengan pertahanan terhadap Korea Utara, melainkan menjadi bagian dari dinamika keamanan kawasan yang lebih luas dalam konteks persaingan kekuatan besar.

Penelitian ini membatasi studi pada periode setelah pemilihan Presiden Yoon Seok Yeol pada Mei 2022, ketika kebijakan untuk memperkuat kembali THAAD diperkenalkan, hingga reaksi yang muncul dari Tiongkok dan negara-negara tetangga. Maka dari itu, penelitian ini tidak hanya meneliti dampak keputusan Presiden Yoon Seok Yeol terhadap stabilitas keamanan di Asia Timur, tetapi juga memperhatikan implikasi diplomatik yang timbul dari sanksi Tiongkok

dan potensi terganggunya hubungan bilateral dengan Korea Selatan. Selain itu, penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan pertahanan yang bersifat defensif tersebut justru dapat memicu respons negatif dari negara lain akibat perbedaan kepercayaan persepsi ancaman, sehingga memperkuat pola ketidakpercayaan dan eskalasi keamanan di kawasan. Pendekatan konsep *security dilemma* akan membantu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan kembali THAAD oleh Presiden Yoon Seok Yeol yang berkontribusi terhadap dilema keamanan di Kawasan Asia Timur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat dilihat bahwa kebijakan Presiden Yoon Seok Yeol untuk menerapkan kembali sistem *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di Korea Selatan berimplikasi langsung terhadap dinamika dilema keamanan di Kawasan Asia Timur. Kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi posisi keamanan Korea Selatan, tetapi juga membentuk interaksi strategis dengan aktor-aktor utama kawasan, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Korea Utara. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana penerapan kembali sistem *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) oleh Presiden Yoon Seok Yeol pada periode 2022-2024 memengaruhi dilema keamanan di Kawasan Asia Timur?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan kembali tentang proses pembangunan pangkalan THAAD pada masa pemerintahan Presiden Park Geun Hye dan penonaktifan pangkalan THAAD pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae In, sampai pada pengaktifan kembali THAAD pada masa pemerintahan Presiden Yoon Seok Yeol.
2. Menyajikan hasil analisis pengaruh pengaktifan kembali THAAD oleh Presiden Yoon Seok Yeol pada periode 2022-2024 terhadap dilema keamanan di Kawasan Asia Timur.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan pemahaman tentang dinamika dilema keamanan kawasan dan hubungan antarnegara di Asia Timur, khususnya dalam konteks penerapan kembali sistem THAAD oleh Korea Selatan.

##### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam studi keamanan kawasan, dengan memperkaya pemahaman mengenai penerapan konsep *security dilemma* dalam konteks Kawasan Asia Timur. Penelitian ini memperluas kajian John H. Herz dan Robert Jervis dengan menghadirkan analisis empiris terkait kebijakan pertahanan Korea Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Yoon Seok Yeol, serta dampaknya terhadap interaksi keamanan antarnegara besar di kawasan. Penelitian ini

diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas dinamika dilema keamanan, aliansi strategis, dan stabilitas keamanan kawasan dalam sistem internasional yang anarkis.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, khususnya di bidang pertahanan dan hubungan luar negeri, dalam merumuskan strategi keamanan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada stabilitas kawasan. Temuan penelitian ini dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam memahami konsekuensi tidak langsung dari kebijakan pertahanan yang bersifat defensif, seperti penerapan kembali THAAD, terhadap persepsi ancaman dan respons negara lain di Kawasan Asia Timur. Selain itu, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi diplomat, analisis keamanan, dan akademisi dalam merancang pendekatan kebijakan yang mampu meminimalkan eskalasi dilema keamanan serta menjaga keseimbangan hubungan strategis antarnegara di kawasan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang membahas permasalahan dampak penerapan kembali sistem THAAD oleh Presiden Yoon Seok Yeol pada periode 2022-2024 terhadap dilema keamanan di Kawasan Asia Timur.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan pentingnya analisis mengenai penerapan kembali sistem THAAD dan dampaknya terhadap dilema keamanan di Kawasan Asia Timur.

Bab ini juga memaparkan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan baik secara akademis maupun praktis.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, argumen utama, serta metode penelitian yang digunakan oleh peneliti.

## **BAB III KRISIS NUKLIR KOREA UTARA DAN PEMBANGUNAN *TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE***

Bab ini membahas perkembangan program dan uji coba nuklir Korea Utara sebagai salah satu faktor utama yang membentuk dinamika keamanan di Semenanjung Korea dan Asia Timur. Pembahasan meliputi perspektif keamanan kawasan negara-negara utama terhadap ancaman nuklir Korea Utara, respons masyarakat internasional melalui sanksi, serta pandangan dan kebijakan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman tersebut. Bab ini juga menguraikan kerja sama keamanan Korea Selatan dan Amerika Serikat, khususnya dalam pembangunan sistem *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD), serta kepentingan strategis Korea Selatan dalam penempatan tersebut.

## **BAB IV PENERAPAN KEMBALI *TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE* DAN DAMPAKNYA TERHADAP DILEMA KEAMANAN KAWASAN ASIA TIMUR**

Bab ini menganalisis dampak penerapan kembali sistem THAAD terhadap dilema keamanan di Kawasan Asia Timur. Pembahasan mencakup penolakan dan respons Tiongkok serta Korea Utara terhadap THAAD, dinamika politik domestik Korea Selatan dari masa Presiden Park Geun Hye hingga Moon Jae In, serta perubahan kebijakan pada masa Presiden Yoon Seok Yeol yang mengaktifkan kembali THAAD. Bab ini juga mengkaji dukungan Amerika Serikat terhadap Korea Selatan, interaksi antaraktor kawasan, serta bagaimana kebijakan tersebut memperkuat dilema keamanan di Kawasan Asia Timur.

## **BAB V      PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi terkait penerapan kembali THAAD oleh Presiden Yoon Seok Yeol pada periode 2022-2024 terhadap dilema keamanan di Kawasan Asia Timur.